

Edisi 84 , Nopember 2022

SENIOR

Media Komunikasi Pensiunan PLN Daerah Jakarta Pusat Pusat



INDONESIA NATIONAL ELECTRICITY DAY

Hari Listrik Nasional ke 77
Dapen PLN -Data Ulang 2022
 Holding PLN dengan 4 Sub Holding
Pajak Karbon di Indonesia

SENIOR Edisi 84 Nopember 2022

PENERBIT

IKPLN DAERAH JAKARTA PUSAT
PUSAT

PEMBINA : Ketua IKPLN DJPP

PEMIMPIN REDAKSI : Doni Marnanto

REDAKTUR PELAKSANA (EDITOR) :

Dewi H Setiani, Fransisca Kolondam,
PanduAngklasito, Prayitno, Garibaldi

KONSTRIBUTOR PELIPUTAN :

Sekretaris IKPLN Daerah & Cabang

SEKRETARIS REDAKTUR :

Fittarini Retno, Winarsih

KREATIF & DESAIN :

Gin Gin Ginanjar, Irwanto Sumadi

**PEMASARAN, PENERBITAN &
SIRKULASI** :

Yuli Retno, Dwi B Suprastitko

IKLAN & KEUANGAN :

Tuti Sulamdari

ALAMAT REDAKSI :

IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat
d/a PT PLN (Persero) Kantor Pusat
Gedung I Lantai-4

Jl. Trunojoyo Blok MI/135
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Email:

senior.ikpln@gmail.com

ikpln_djpp@pln.co.id

Daftar Isi

SEKAPUR SIRIH2

TOPIK UTAMA - Hari Listrik Nasional.....3

INFO PENTING - Pemberitahuan
Pendataan Ulang (DATUL) Tahun 20225

BERITA PLN - Holding PLN dengan 4 Sub-
Holding.....6

BERITA DALAM FOTO9

 IKPLN Cabang LMK.....9

 IKPLN Cabang P2B & TJBB9

 IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat ...10

INFO NIAGA12

 PLN Insurance (PT APLN).....12

 Tahukah Anda ada Bisnis yang
 Gagalnya Saja Orang Suka.....15

ILMU PENGETAHUAN –23

 Pembentukan Holding & Subholding
 Company dan Tantangan Transformasi
 Digital.....23

 Pajak Karbon di INDONESIA.....27

AGAMA –Tauladan Kejujuran Nabi
MUHAMMAD SAW dalam Berniaga33

RAGAM - Cubit – Cubitan35

Ilustrasi sampul muka:

Hari Listrik Nasional

Ilustrasi sampul belakang:

PT Adhi Guna Putera

SEKAPUR SIRIH

Bulan Oktober merupakan bulan yang penting bagi PLN. Pada bulan itu merupakan tonggak bersejarah terbentuknya Perusahaan Listrik Negara.

Sejarah PT PLN (Persero) bermula pada 27 Oktober 1945 saat Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengelola pembangkit listrik yang dimiliki saat itu dengan kapasitas total 157,5 MW.

Dalam perjalanan 77 tahun telah banyak perubahan yang dilakukan oleh PLN, perkembangan terakhir dapat disimak dalam edisi ini.

Sudah menjadi ketentuan dari Dana Pensiun PLN untuk melakukan Data Ulang (DATUL) keanggotaan para pensiunan PLN setiap tahun, untuk meyakini ketepatan dan keabsahan pembayaran Manfaat Pensiun. Batas waktu Datul 2022 ini adalah tanggal 26 Desember 2022. Informasi lebih lanjut, silakan dibaca artikelnya.

Kegiatan IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat dan Cabang-cabangnya selama 3 bulan terakhir, antara lain kegiatan IKPLN Cabang LMK, IKPLN Cabang P2B & TJBB serta Rapat Kordinasi IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat dengan Cabang-cabang. Dapat disimak lebih lanjut dalam edisi ini.

Dalam rubrik Info Niaga ada beberapa tulisan mengenai PLN Insurance disebut juga PT APLN (PT Asuransi Perisai Listrik Nasional), Central Asia Raya 3i dan Asuransi Syariah Istikmal. Banyak yang ditawarkan, tetapi harus teliti dan bijak sebelum memutuskan untuk memilih.

Rubrik Ilmu pengetahuan kali ini ada bahasan dari Dr Manerep Pasaribu mengenai “Analisa Pembentukan Holding dan Sub Holding”. Kemudian artikel kedua mengenai “Pajak Karbon”.

Rubrik agama membahas “Tauladan Kejujuran Nabi Muhammad SAW didalam Berniaga”.

Selamat Membaca

TOPIK UTAMA - Hari Listrik Nasional



Oleh : Fitta-Rini Retno (*)

Bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 2022 ini, PT PLN (Persero) genap berusia 77 th. Suatu usia yang matang, terutama bila dilihat dari perjalanan panjang yang telah dilalui.

Suasana menyambut usia baru, sangat terasa. Terutama dengan dicanangkannya transformasi PLN dengan membentuk holding sub-holding dengan menata struktur korporasi di PLN.

Dengan dicanangkannya transformasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai dapat tercapai.

Tahun ini HLN mengambil tema the new Pln 4.0 unleashing energy and beyond. Tema ini dipilih sejalan dengan pln yang sedang bertransformasi dan berkomitmen menghadirkan terang di seluruh negeri serta menjadi bagian

dalam perjuangan membangun Indonesia tangguh dalam memberikan aspirasi kepada seluruh stakeholders pln untuk terus bergerak menjadi lebih baik.

Sebagai salah satu anggota BUMN, maka tata nilai yang dianut PLN adalah sesuai yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN sejak 2020 adalah AKHLAK, yang akronim dengan:

1. AMANAH : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
2. KOMPETEN : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. HARMONIS : Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. LOYAL : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
5. ADAPTIF : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. KOLABORATIF : Membangun kerjasama yang sinergis

Eksistensi pln sebagai satu satunya BUMN pemegang kuasa usaha kelistrikan saat ini, tentunya tidak lepas dari sejarah berdirinya pln.

Sejarah panjang PLN dimulai sejak abad 19 dimana pada saat itu pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan mereka sendiri.

Namun sejak berdirinya perusahaan listrik Belanda yaitu NV NIGN yang tadinya bergerak di bidang gas, yang kemudian beralih menjadi perusahaan yang juga

mengelola listrik maka penyediaan tenaga listrik menjadi konsumsi umum.

Tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk Lands Waterkracht Bedrijven (LWB) yaitu Perusahaan Listrik Negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok dago, PLTA Ubrug dan krack di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta.

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam perang dunia 2 pada tahun 1942, maka Indonesia dikuasai Jepang. Perusahaan listrik dan gas juga diambil alih oleh Jepang, dan semua personal dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang.

Dengan jatuhnya Jepang ke tangan Sekutu pada tahun 1945, dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, merupakan peluang emas yang dimiliki oleh Indonesia. Dan kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang.

Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan Jepang, pada bulan September 1945 suatu delegasi dari buruh/pegawai listrik dan gas menghadap pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh M. Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka.

Selanjutnya, delegasi bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat menghadap

Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia.

Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno, dan kemudian dengan **Penetapan Pemerintah No. 1 tahun 1945 tanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga.** Untuk mengelola pembangkit dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Dengan adanya agresi Belanda I dan II sebagian besar perusahaan perusahaan listrik dikuasai kembali oleh pemerintah Belanda. Pegawai yang tidak mau bekerjasama kemudian mengungsi dan menggabungkan diri pada kantor-kantor jawatan listrik dan gas di daerah Republik Indonesia yang bukan daerah pendudukan Belanda.

Sejalan dengan meningkatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Jaya dari Belanda maka dikeluarkan Undang-undang no 86 th 1958 tertanggal 27 Desember 1958 tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Dengan undang-undang tersebut, maka seluruh perusahaan listrik Belanda berada di tangan Indonesia.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas.

Pada tanggal 1 Januari 1965 BPU-PLN dibubarkan dan secara bersamaan dibentuk 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN)

sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai

PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Penetapan secara resmi tanggal 27 oktober 1945 sebagai hari listrik nasional ditetapkan oleh keputusan Menteri Pertambangan dan Energi no 1134.k/43.pe/1992 tanggal 31 agustus 1992.

Semoga dengan seiring bertambah usia, PLN dapat semakin maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai dan pensiunan dan semoga 4 pilar yang telah dicanangkan dapat memperkokoh kerjasama yang selama ini telah terjalin.

(* IKPLN Cabang Kantor Pusat

INFO PENTING - Pemberitahuan Pendataan Ulang (DATUL) Tahun 2022

Dana Pensiun PLN kembali mengumumkan kepada para penerima Manfaat Pensiun untuk melakukan Pendataan Ulang (DATUL), untuk meyakini ketepatan dan keabsahan pembayaran Manfaat Pensiun

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Datul Tahun 2022 diberlakukan bagi Penerima MP Bulanan seluruh Indonesia yang telah menerima MP sampai dengan 31 Desember 2021.

2. Datul mulai dilaksanakan akhir September 2022 dan informasi untuk pelaksanaannya disampaikan melalui *Whatsapp* (WA) serta SMS kepada Penerima MP yang nomor *Handphone* (HP)-nya terdaftar di DP-PLN

3. Sebagaimana Datul tahun sebelumnya, Datul tahun ini juga dilakukan melalui aplikasi *Android DP-PLN Mobile* yang dapat diperbarui kembali di *Google Play Store*.

4. Bagi Penerima MP yang memiliki masalah dalam HP Androidnya, formulir Datul 2022 dapat diunduh di situs website DP-PLN www.dppln.co.id.

Khusus bagi yang berdasarkan data yang ada di kami tidak memiliki nomor HP, formulir Datul akan kami sampaikan melalui Pos ke alamat masing-masing Penerima MP.

5. Khusus Datul 2022 ini, sebelum melakukan data ulang, seluruh Penerima MP harus mengisi "Survei Dampak Pandemi *Covid-19* terhadap pelayanan DP-

PLN" yang tersedia di Aplikasi *DP-PLN Mobile* atau dapat diunduh di web DP-PLN.

6. Batas waktu Datul 2022 ini adalah tanggal **26 Desember 2022**. Bagi Penerima MP yang belum melakukan Datul sampai dengan tanggal **26 Desember 2022**, maka akan dilakukan **Penangguhan Sementara** pembayaran MP pada bulan- bulan berikutnya sampai yang bersangkutan melakukan Datul

(Sumber : Surat Pemberitahuan DAPEN PLN)

BERITA PLN - Holding PLN dengan 4 Sub-Holding

Holding PLN dengan 4 Sub-Holding Baru Diumumkan Menteri BUMN, Makin Lincah Jadi Perusahaan Energi Berbasis Teknologi Menyambut Masa Depan.

Jakarta, 22 September 2022 – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi meluncurkan Holding Subholding PT PLN (Persero) pada Rabu, 21 September 2022. Langkah ini akan membawa PLN menjelma menjadi perusahaan energi yang berbasis

teknologi, inovasi dan berorientasi pada masa depan menuju The NEW PLN 4.0 UNLEASHING ENERGY and BEYOND.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, dengan pembentukan Holding Subholding ini, PLN mempunyai 4 Subholding yang akan membawa perusahaan menjadi semakin kokoh, kuat dan cekatan dalam pengembangan usaha.

Keempat Subholding tersebut adalah PLN Energi Primer Indonesia, PLN Nusantara



Power (Generation Company 1), PLN Indonesia Power (Generation Company 2) dan PLN ICON Plus. Hal terpenting dari empat subholding ini, masing-masing akan memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN dalam melistriki nusantara. Keempat Subholding ini akan tetap saling terkoneksi terutama dalam memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan.

“PLN terus melakukan transformasi untuk mengoptimisasi fungsi PLN sebagai jantungnya Indonesia, mengelola usaha ketenagalistrikan, dengan mengubah proses bisnis menjadi lebih lincah, cepat, dan trengginas serta memastikan elektrifikasi berjalan secara lancar dan menjadi pioneer dalam energi listrik berwawasan lingkungan di masa depan,” ujar Darmawan.

Darmawan mengungkapkan, dengan adanya Holding Subholding, aset-aset

pembangkitan PLN yang tadinya tersebar kini akan dikonsolidasikan.

Proses bisnis pengelolaan pembangkitan disederhanakan.

Utilisasi aset yang tadinya belum maksimal, akan makin dioptimalkan.

Konsolidasi aset pembangkitan ini

membentuk 2 Subholding GenCo yang akan menjadi Generation Company terbesar se-Asia Tenggara, yaitu PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power.

“Kami juga membentuk dua entitas bisnis baru, renewable energy dan Geothermal. Sebagai komitmen PLN mengakselerasi transisi energi menuju energi bersih masa depan,” terang dia.

Begitu pula pengelolaan energi primer, lanjut Darmawan, bakal dikonsolidasikan dalam Subholding PLN Energi Primer Indonesia.

Pengadaan batu bara yang tadinya tersebar di 5 titik akan dikonsolidasikan di satu titik sehingga lebih efektif dan efisien.

“Dan untuk mendukung transisi energi, kami bangun core kompetensi baru, pada energi berbasis biomassa.

Dengan struktur baru ini, pengadaan energi primer tidak hanya meningkatkan

keandalan. Tetapi juga sekaligus membangun value creation yang besar, bagi PLN,” paparnya.

Terakhir, PLN akan membangun lini bisnis baru di luar kelistrikan atau Beyond kWh yang akan konsolidasikan di dalam subholding PLN ICON Plus.

“Aset-aset kelistrikan yang tadinya digunakan hanya untuk layanan kelistrikan, kami kembangkan untuk layanan beyond kWh. Ada layanan internet, ada PLN market Place, ada EV Charging, baterai swap, sistem Charge-in, rooftop, ListriQu, dan lainnya. Super App kami New PLN Mobile, menjadi ujung tombaknya,” papar Darmawan.

Sementara PLN sebagai Holding bisa berfokus pada hal yang lebih strategis. Seperti pengelolaan dan pengembangan portofolio bisnis. Lini bisnis transmisi, distribusi, dan pemasaran listrik juga dikelola oleh PLN holding untuk peningkatan dan perluasan layanan pelanggan.

“Untuk PLN Holding, karena sudah ada Subholding, maka PLN Holding akan fokus pada pengembangan portofolio, perluasan pelanggan serta meningkatkan kualitas layanan ke pelanggan dan seluruh masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi,” ujar Darmawan.

Dengan Holding Subholding ini, Darmawan meyakini proses bisnis PLN menjadi jauh lebih efektif dan efisien.

Utilisasi aset menjadi jauh lebih optimal. Core Competency serta Technical Skills akan jauh lebih fit. Akan jauh lebih relevan, dalam menghadapi tantangan zaman.

Tak hanya itu, Corporate culture akan menjadi jauh lebih produktif dan profesional. Struktur organisasi yang tadinya statis, menjadi dinamis. Transisi energi pun akan menjadi lebih terakselerasi.

“Pak Erick Thohir juga mengingatkan, Pak dirut dalam proses Holding Subholding ini jangan sampai ada hak pegawai PLN yang dikurangi. Kami siap laksanakan. Lalu bahwa dalam Holding Subholding ini justru membuka pengembangan pegawai yang lebih luas lagi. Ini kami siap juga laksanakan,” pungkasnya.

Narahubung

Gregorius Adi Trianto

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN

Tlp. 021 7261122

Facs. 021 7227059

Sumber :

<https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2022/09/holding-pln-dengan-4-subholding-baru-diumumkan-menteri-bumn-makin-lincah-jadi-perusahaan-energi-berbasis-teknologi-menyambut-masa-depan>

BERITA DALAM FOTO

KEGIATAN IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat dan Cabang Cabangnya – Berita dalam Foto

IKPLN Cabang LMK

Pertemuan pengurus IKPLN Cabang LMK sebagai ketua bp Joko Sutono sebagai pengganti alm bp Abdulrahman Arigayota dengan Manajemen PT PLN PUSERTIF , pada tanggal 19 Oktober 2022. Selain silaturahmi & pengenalan , dibahas juga kegiatan rutin yang dilakukan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan IKPLN Cabang LMK.



Foto dari kiri ke kanan , bapak Margono, ibu Endang Irianti, bapak Doni Marnanto, bapak Joko Sutono, bapak Septa Hamid, ibu Syubhana, bapak Gin Gin Ginanjar, dan bapak Mohammad Asngadi.

Hadir dalam acara ini General Manager PT PLN PUSERTIF bapak Septa Hamid selaku Pembina Utama, Senior Manager Keuangan, Komunikasi & Umum PT PLN PUSERTIF ibu Syubhana sebagai Pembina, serta Pengurus dan Penasehat IKPLN Cabang LMK. (DM)



IKPLN Cabang P2B & TJBB

Pengajian rutin setiap hari selasa anggota IKPLN di Masjid Baitul Ihsan PLN TJBB/P2B Gandul, alhamdulillah 16 org yg bs hadir. Pengajian ini dipimpin / dibimbing Ustad DAUD imam masjis raya Cinere. (Haris Efendi - IKPLN Cabang P2B & TJBB)



IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat

Rapat koordinasi dengan Cabang Cabang

Personel Ketenagalistrikan
(Pembangkitan, Transmisi/GI &
Distribusi)

Majalah yg diterbitkan IKPLN Pusat /
Daerah / Cabang mendapat kopensasi
dari DAPEN PLN.



Pada tanggal 6 Oktober 2022 bertempat di PLN UDIKLAT Bogor ruang Dahlan, telah dilaksanakan rapat koordinasi IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat dengan Cabang cabang dilingkungannya.

Ringkasan hasil rapat adalah sebagai berikut :

Di usulkan uji SERKOM 100 Peserta per tahun. SERKOM meliputi semua bidang. Program SERKOM yang dilaksanakan YPK PLN bekerja sama dengan anak usaha ITPLN, yaitu PT STT. (Saham PT STT : 90% YPK PLN , 10% IT PLN). Kompetensi Assesor Ketenagalistrikan belum ada. Termasuk yang berminat uji Kompetensi

Sampai saat ini IKPLN Cabang Kantor Pusat telah menerbitkan buletin KALAWARTA. Sedang IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat menerbitkan kembali majalah SENIOR yang pernah berhenti selama pandemi.

Bagi anggota yang berminat dengan bisnis modal kecil, seperti jasa kurir pengiriman paket. Menjadi agen seperti PT POS, JNE, TIKI. Modal (deposit) ada pilihan Rp 3 sd 5 juta, ruangan dan timbangan. Agar Cabang membuat usaha kurir seperti ini.

Ditemukan informasi anggota yang sudah meninggal a/n Imh bu Rani (istri alm pak Jaman). Meninggal pada tahun 2020 akhir. Dokumen kematian tidak/belum ditemukan para ahli warismya. Diusahakan menghubungi ke RT, RW , Kelurahan setempat.

Ditemukan nama anggota berbeda dengan nama yang tercantum dalam DATUL. Dapat menghubungi DAPEN PLN dengan membawa Kartu anggota pensiunan PLN, KTP, Akta Lahir, KK, Surat Nikah untuk konfirmasi. SK Pensiun sudah ada di database DAPEN PLN.

Anggota yang belum menerima KPS (Kartu PLN Sehat) yang baru ditolak sebuah faskes. Pada prinsipnya kalau kartu PLN Sehat belum ada/diterima dan belum berfungsi , bisa menggunakan NIK KTP. (DM)

Budidaya Jamur Tiram di Goleah, Megamendung, Bogor

IKPLN Daerah Jakarta Pusat Pusat dan Cabang-Cabang nya pada hari kamis 6 Oktober 2022 menyempatkan mengunjungi budi daya jamur tiram di Goleah, Megamendung, Bogor.

Bangunan sederhana beratap asbes seluas 16 x 22 meter di gunakan untuk : area pencampuran bahan media tanam, alat perebusan media tanam, ruang inoklasi, ruang inkubasi & ruang

bumbung (*growing*). Pemilik budi daya bapak Victor Sitorus seorang pensiunan PLN, sudah melakukan beberapa kali skema budidaya untuk mencari cara yang lebih efisien.



Ruang bumbung (*growing*) merupakan ruang produksi seluas 8 x 16 meter bisa menampung 50.000 polibag bibit jamur. Modal yang diperlukan untuk lahan 8 x 16 meter sebesar Rp 70 juta.



Dalam ruang bumbung (*growing*) terdapat rak-rak. 1 rak besar yg dibagi 5 tingkat rak kecil, dengan panjang rak 3,5 m dan lebar 80 cm bisa muat 1500 bibit, biaya untuk 1000 bibit @ Rp 2500,- Sebagai ilustrasi hitungan kasar sebagi

berikut. Hasil total 1500 x 0,3 kg selama masa produksi (3 sd 3,5 bulan). Harga di petani 450 kg @ Rp.11.000 sama dengan Rp 4,95 juta. *Gross profit* Rp 1,2 juta. Panen per hari kira-kira $450/90 = 5$ kg.

Pada skala percobaan 2 kali ini, panen sekitar 20 kg perhari dengan bibit di dalam ruang *growing* sekitar 5.500 bibit

Direncana bulan depan akan mengisi 26.000 bibit (dengan bibit dibuat sendiri) sehingga selama 3 bulan bisa dihasilkan sekitar 90 kg jamur. (DM)

INFO NIAGA

PLN Insurance (PT APLN)



PT Asuransi Perisai Listrik Nasional didirikan pada tahun 1991 semula bernama PT Asuransi Ratu Sampoerna dan pada tahun 1994 terjadi perubahan nama perusahaan menjadi PT Asuransi Tugu Kresna Pratama. Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Asuransi Perisai Listrik Nasional pada 10 Oktober 2017, struktur

kepemilikan PT Asuransi Perisai Listrik Nasional mengalami perubahan, dimana saham pengendali (mayoritas) adalah Group PT PLN (Persero) dengan komposisi seperti pada diagram dibawah. Perubahan ini diikuti pula

perubahan nilai-nilai komitmen PT Asuransi Perisai Listrik Nasional untuk menggapai visi dan misinya dimana PT Asuransi Perisai Listrik Nasional diutamakan dapat memberikan proteksi (asuransi) atas aset dan kepentingan PT PLN demi terjaganya kesinambungan tersedianya tenaga listrik, namun demikian dengan tuntutan dunia usaha yang kompetitif dan dinamis, maka PT Asuransi Perisai Listrik Nasional diharapkan juga dapat bersaing untuk memberikan layanan asuransi kepada segmen pasar bebas lainnya.

Produk produknya, antara lain :

1. Retail terdiri dari :
 - a) Asuransi MGM. Program Asuransi Mitra Ganda Manfaat

- (Program Asuransi MGM) adalah jaminan santunan tambahan bagi para pekerja
- b) Asuransi Kesehatan. Asuransi yang memberikan penggantian terhadap biaya medis bagi karyawan dan keluarga karyawan Perusahaan. Dalam bentuk ASO.
 - c) Asuransi Kebakaran. Asuransi kebakaran memberikan penggantian jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran. Objek yang diasuransikan bisa berupa barang atau harta benda berupa bangunan.
 - d) Asuransi Property All Risks/ Industrial All Risks. Asuransi Property All Risks/ Industrial All Risks merupakan asuransi yang menjamin kerugian dari semua risiko (unnamed perils) atas bangunan dan harta benda, kecuali risiko yang tercantum di dalam polis asuransi. Polis Jenis ini juga dapat ditunjukkan untuk penggunaan properti pabrik.
2. Korporat, terdiri dari :
- a. Aneka, terdiri :
 - i. Asuransi Kecelakaan Diri (PA)
 - ii. Asuransi Tanggung Gugat (General Liability)
 - iii. Asuransi Uang (CIT/CIS/FD)
 - iv. Asuransi Profesi (PI)
 - v. Asuransi Papan Reklame (Neon Sign/Billboard)
 - vi. Asuransi Kebongkaran
 - vii. Asuransi Barang Bergerak (MAR)
 - viii. Asuransi Direksi dan Pejabat Perusahaan (D&O)
 - b. Pengangkutan, adalah suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian, kerusakan atau kehilangan barang (cargo) dalam proses pengiriman baik melalui moda angkutan darat, laut dan udara dari risiko perjalanan yang dapat menimpa alat angkut terbalik, tenggelam, terbakar atau bahkan pencurian selama perjalanan.
 - c. Kendaraan Bermotor, adalah suatu bentuk asuransi yang memberikan jaminan atas kerusakan atau kerugian pada kendaraan sesuai Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dengan jaminan komprehensif (Gabungan) dan kerugian total, dapat diperluas dengan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, kecelekaan pengemudi dan penumpang, serta kerusuhan serta

- bencana alam sesuai kebutuhan.
- d. Rangka Kapal, adalah suatu bentuk asuransi yang memberikan jaminan atas kerusakan atau kerugian pada rangka kapal dan mesin mesin selama kapal dalam perjalanan dari bahaya kelautan misalnya akibat tabrakan, tenggelam, kandas, kebakaran atau hilang.
- e. Kredit, adalah Asuransi yang memberikan perlindungan kepada Bank atau Lembaga Keuangan atas risiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit, Perlindungan diberikan atas risiko kegagalan Tertanggung sebagai debitur untuk melunasi fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Umum maupun Lembaga Pembiayaan Keuangan lainnya.
- f. Penjaminan, adalah Asuransi yang menjamin risiko akibat kegagalan atau cedera janji (wanprestasi) dari Principal atau Kontraktor dalam melaksanakan kontrak sesuai jadwal dan kesepakatan awal dengan pemilik proyek (Obligee). Selanjutnya principal membayar kembali kepada Surety (Penjamin) sesuai perjanjian subrogasi, setelah pembayaran ganti rugi dari Surety ke Obligee.
- g. Rekayasa, adalah asuransi yang menjamin semua risiko atas kerugian atau kerusakan pada objek pertanggung di lokasi proyek selama pekerjaan konstruksi, aktifitas teknik berupa pemasangan, instalasi dan pemeliharaan. Produknya meliputi :
- i. Asuransi Semua Risiko Kontraktor (CAR/EAR)
 - ii. Asuransi Kerusakan Mesin (MB)
 - iii. Asuransi Peralatan Elektronik (EEI)
 - iv. Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor (CPME)
 - v. Asuransi Risiko Komprehensif Rekayasa Sipil (CECR)
 - vi. Asuransi Mesin Komprehensif (CMI)
- h. Pengamanan, adalah Asuransi memberikan jaminan kerugian atas hilangnya keuntungan/pendapatan keuntungan yang mungkin akan diperoleh, sebagai akibat dari Pemadaman Listrik.
- i. Harta Benda

Jasa yang diberikan oleh PT APLN (PLN Insurance) kepada PLN dalam bentuk ASO.

Apa Itu ASO?

ASO (Administration Service Only) adalah suatu jasa layanan pengelolaan administrasi dari dana pemeliharaan kesehatan dari Perusahaan kepada karyawan-karyawannya dimana layanan ASO ini merupakan pihak ketiga antara Perusahaan dengan karyawannya untuk melaksanakan administrasi pembayaran atau penolakan klaim sesuai keputusan Perusahaan (manfaat yang diberikan Perusahaan kepada karyawannya) dan tidak menanggung risiko apapun.

Sistem Layanan ASO ini akan membantu Perusahaan dalam memantau dana kesehatan, menganalisa program kesehatan serta dapat meminimalisir

dana kesehatan. Perusahaan akan memberikan deposit (simpanan) yang akan digunakan oleh tim Layanan ASO untuk membayar penyedia layanan kesehatan dalam hal ini Provider (Rumah Sakit, Klinik, Lab, Optik, Apotek, dll) ataupun kepada karyawan yang mengajukan klaim secara Reimburse. Oleh karena itu, penyedia layanan ASO ini harus mempunyai jaringan Provider (Fasilitas Kesehatan) yang dapat digunakan oleh karyawan Perusahaan tersebut untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara Cashless (non tunai).

PT. Asuransi Perisai Listrik Nasional Kantor Pusat

Jl. Raya Pasar Minggu No.5 Pancoran
Jakarta – 12780 – Indonesia

Phone : 021 – 7995888 (Hunting)

Fax.: 021- 7920988, 79184342, 79183422

Customer Service :

cs@plninsurance.co.id

www.plninsurance.co.id

Tahukah Anda ada Bisnis yang Gagalnya Saja Orang Suka

Oleh: Dodoh Rahmat-(HP:08127109001) (**)

Tidak sedikit orang yang enggan berbisnis karena ketakutan akan resiko rugi. Padahal setiap kegiatan selalu ada resiko yang membayangnya. Haruskah kita takut menghadapi resiko? Resiko adalah suatu keniscayaan dalam setiap kegiatan. Tugas kita adalah bagaimana me-manage

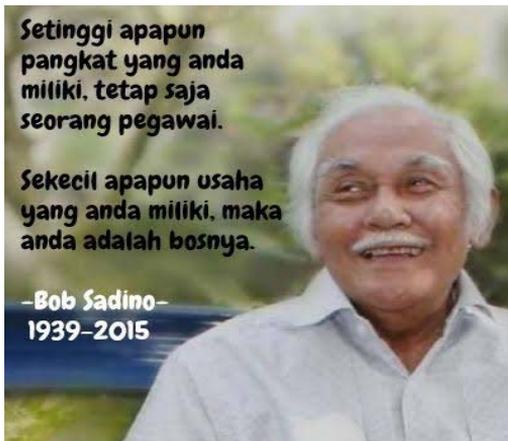
kemungkinan terjadinya resiko tersebut agar kita terhindar dari resiko kerugian.



Judul tulisan diatas ini mungkin dirasakan cukup menggelitik, termasuk bagi penulis sendiri di awal mengikuti kegiatan bisnis ini pada tahun 2018.

Judul ini ditulis dengan sengaja berdasarkan pengalaman pribadi penulis mengikuti bisnis ini yang sekarang sudah memasuki tahun ke 5.

Sebagai pembuka penulis ingin menyampaikan bahwa menurut Robert T. Kyosaki dalam bukunya The Cash Flow Quadrant menjelaskan bahwa manusia hidup membutuhkan uang, dan siapapun

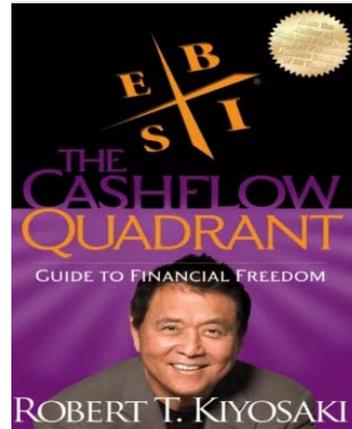


yang mencari uang dalam kegiatannya terbagi menjadi 4 (empat) Quadrant yang dikenal dengan Quadrant ESBI.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Kuadran yang pertama yaitu kuadran E, kependekan dari Employee atau Pekerja atau Pegawai:

Orang-orang yang melakukan kegiatan di kuadran E ini adalah mereka yang bekerja mengikuti system yang sudah ada di



tempat kerja tersebut. Misalnya: Masuk kantor untuk mulai kerja jam 08.00 dan baru boleh pulang jam 16.00, setiap tanggal 1 menerima uang gaji.

Kuadran yang kedua yaitu kuadran S, kependekan dari Self Employed atau Mengerjakan Dirinya Sendiri:

Biasanya kelompok bisnis ini termasuk bisnis kecil atau perusahaan kecil dimana Sang Pemilik harus ikut terjun langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari usahanya. Tanpa keterlibatan Sang Pemilik maka usahanya tidak bisa berjalan.

Termasuk dalam kelompok ini adalah para professional seperti Dokter yang buka praktek sendiri. Kalau Dokter yang bekerja di Rumah Sakit itu termasuk kelompok kuadran E.

Ke dua kelompok ini yaitu kelompok E dan S termasuk kepada **kelompok Active**

Income artinya mereka baru akan dapat penghasilan apabila mereka aktif bekerja. Kalau mereka tidak aktif bekerja maka penghasilan mereka pun tidak ada.

Kuadran yang ketiga adalah kuadran B, kependekan dari Business Owner:

Pada kelompok ini prinsip dasarnya adalah **Ada Orang dan Ada System**, sehingga Sang Pemilik Bisnis dapat mempunyai waktu yang lebih banyak dan tidak perlu khawatir karena ada system yang sudah diset-up atau ditentukan oleh Sang Pemilik, dan ada orang lain yang menjalankannya.

Kuadran B terbagi kepada 3 jenis yaitu:

- 1). Bisnis Konvensional
- 2). Waralaba atau Franchising
- 3). Pemasaran Berjenjang, yang terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu:
 - a). Networking
 - b). Multi Level Marketing (MLM)
 - c). Money Game

Kuadran B bagian 1): **Bisnis Konvensional**. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar seperti pabrik dimana memerlukan investasi/modal yang besar dan tentunya menghadapi resiko yang besar pula (salah satunya adalah pemogokan buruh pabrik). Apakah keuntungan yang akan didapat besar? atau malah kerugian yang

besar yang akan dideritanya? Hal ini masih tanda tanya besar.

Kuadran B bagian 2): **Waralaba atau Franchising**. Ini adalah model bisnis modern yang bagus, akan tetapi memerlukan modal yang besar juga, serta tidak sedikit resiko yang dihadapinya. Contohnya adalah KFC, Mc Donald, Giant, Hero, Matahari, Centro, Golden Truly, dll, saat ini sudah banyak yang tutup seiring dengan mewabahnya pandemi Covid 19.

Kuadran B bagian 3): **Pemasaran Berjenjang**. Orang kebanyakan memahami bisnis jenis ini adalah MLM (Multi Level Marketing) padahal setelah penulis mempelajarinya dengan lebih seksama ternyata kuadran B.3) ini sebenarnya terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu **a). Networking, b). MLM dan c). Money Game**.

Kebanyakan orang menyamakan pemahaman ke 3 jenis ini karena memiliki kemiripan karakter yaitu adanya Upline dan Downline serta adanya gambar pohon jaringan. Padahal kalau kita sadari dalam semua kegiatan bisnis pasti ada Upline dan Downline dan kalau digambarkan pasti ada pohon jaringannya. Saya suka menggambarkannya secara sederhana seperti kita bekerja di PLN, ada Dirut di puncak paling atas, kemudian dibawahnya ada Direktur2, dibawahnya lagi ada Kepala Divisi (EVP), dibawahnya lagi ada Kepala Dinas (VP), dan dibawahnya lagi ada para staf. Pembinaan atau kebijakan atau instruksi datangnya

berjenjang pula dari yang paling atas sampai ke tingkat pelaksana paling bawah. Dan tingkat pelaksana paling bawah seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya keahlian maka dia akan naik meniti kariernya sampai ke puncak karier. Tentu saja peningkatan karier seseorang ini ada persyaratan² yang harus dipenuhinya. Apabila seorang pelaksana tidak memenuhi persyaratan kenaikan jenjang karier tentu saja tidak akan dapat meraih karier di atasnya. Seseorang tidak mungkin begitu melamar kerja ujug² langsung menempati posisi puncak, akan tetapi ada tangga-tangga karier yang harus dilaluinya. Demikian juga dalam bisnis Pemasaran Berjenjang.

Kuadran yang ke 4 adalah Kuadran I, kependekan dari Investor atau Kuadran Penanam Modal.

Pada kuadran ini adalah seseorang yang punya modal uang yang cukup banyak lalu dia menginvestasikannya dalam kegiatan bisnisnya. Misal mempunyai apartemen yang disewakan, hotel, perkebunan, dan sejenisnya.

Selanjutnya penulis akan lebih memfokuskan pembahasan pada Kuadran B bagian ke 3) yaitu **Pemasaran Berjenjang**.

Apa bedanya antara Networking, MLM dan Money Game?

Dalam tulisan ini Penulis mengambil referensi dari Fatwa MUI tentang syarat-syarat Pemasaran Berjenjang yang dihalalkan/diperbolehkan.

Ada 3 (tiga) prinsip dasar sehingga bisnis Pemasaran Berjenjang diperbolehkan/dihalalkan, yaitu:

1. Tidak boleh ada unsur Riba atau mem-Bunga-kan uang.
2. Tidak boleh ada yang disembunyikan atau Gharar, semua harus jelas baik obyek bisnis maupun aturan-aturannya.
3. Tidak boleh ada unsur judi atau untung-untungan atau Maysir.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar diatas maka sejauh tidak terdapat ke tiga unsur tersebut maka bisnis diperbolehkan.

Berikut penulis ingin mensosialisasikan 2 (dua) peluang bisnis yang ditawarkan oleh Group Bisnis Raksasa Central Asia Raya yaitu:

1. Central Asia Raya 3i (Investment, Income, Insurance).
2. Asuransi Syari'ah Istikmal (=penyempurna). Sempurnakan Masa Depan Menuju Hidup Penuh Berkah.

Central Asia Raya 3i (CAR 3i)

CAR 3i Networks adalah suatu system

pemasaran berjenjang Asuransi Jiwa melalui jaringan keagenan 3i Networks yang mengajak setiap Nasabah selain mempunyai investasi atau tabungan, juga mendapat perlindungan (proteksi) Asuransi, dan penghasilan sebagai agen pemasaran Asuransi Jiwa.

Kenapa harus CAR 3i Networks?

Karena dengan menabung di CAR 3i Networks nasabah mendapatkan kesempatan untuk:

- a). Mempunya Dana yang aman karena legalitas perusahaannya jelas dan diawasi oleh Pemerintah melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- b). Pembagian keuntungan menggunakan prinsip Bagi Hasil, bukan Bunga.
- c). Dana yang tersimpan dikelola oleh perusahaan, bisa diambil setiap saat tanpa harus menunggu terjadi sakit.
- d). Cara pengambilan dana sangat mudah. Bisa dilakukan setiap saat disetiap kantor perwakilan CAR terdekat di seluruh Indonesia.
- e). Lama menabung hanya 5 (lima) tahun saja, akan tetapi dapat menikmati manfaat untuk jangka panjang hingga usia nasabah mencapai 75 (tujuh puluh lima) tahun.
- f). Setiap penabung mendapat perlindungan Asuransi Jiwa sebesar 60x (enam puluh kali) besarnya tabungan bulanan yang dipilih, walaupun baru 1x menabung

kemudian terjadi resiko kematian maka Ahli Waris mendapatkan santunannya 60x besarnya tabungan bulanan yang dipilih.

- g). Setiap nasabah berkesempatan untuk menjadikan Program ini sebagai Bisnis tanpa harus meninggalkan pekerjaan pokok.
- h). Perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap nasabah untuk memperoleh penghasilan ratusan ribu hingga ratusan juta Rupiah setiap bulannya.
- i). CAR 3i bukan penipuan, alamat kantornya jelas serta telah mendapatkan penghargaan dari berbagai otoritas ternama.
- j). Sekali kita berhasil mengajak seseorang untuk bergabung di bisnis ini maka kita mendapatkan bonus selama 3 (tiga) tahun selama orang yang kita ajak konsisten menabung setiap bulannya.
- k). Telah banyak orang-orang yang membuktikan keberhasilannya di bisnis ini.

Contoh kecilnya adalah Koperasi IKPLN Cabang Kantor Pusat yang menabung selama 3,5 th @ Rp 350 rb (atau = Rp 14,7 jt) mendapatkan bonus sebesar Rp 13,3 juta hanya dengan mengajak 11 orang saja untuk bergabung.

Contoh besarnya seperti bukti pembayaran dibawah ini:

(**) IKPLN Cabang Kantor Pusat



Bonus & Jenjang Karir



INCOME STATEMENT

3i-Networks
PERIODE : Mei 2020

DATA AGEN :

Mitra : 00007 - AFRIAL
 Upline :
 Sponsor :
 Peringkat : Crown Agency
 Premi Pribadi : 700,000.00
 Premi Group : 36,832,550,000.00

Rp. 383.153.402,-

Tanggal Daftar : 13 Januari 2014
 Premi Pribadi Th-1 : 0.00
 Premi Group Th-1 : 13,759,100,000.00

Detail Income Statement :

Bonus Rekrut : 962,570.00
 Tahun - 1 : 650,195.00

Bonus Persistensi : 4,622,837.00
 Bonus Bulan Ini : 383,153,402.00

Asuransi Syariah Istikmal

Oleh: Dodoh Rahmat-(HP:08127109001) (**)



Program Asuransi Syariah Istikmal ini sangat cocok bagi siapapun yang



mendambakan ingin mengunjungi atau berziarah ke Tanah Suci agama apapun, namun terkendala dengan keuangannya.

Misal untuk pemeluk agama Islam ke Tanah Suci Mekkah-Madinah, untuk pemeluk agama Kristen ke Yerusalem, untuk pemeluk agama Hindu ke India, untuk pemeluk agama Kong Hu Cu ke Tibet atau China, dan sebagainya.

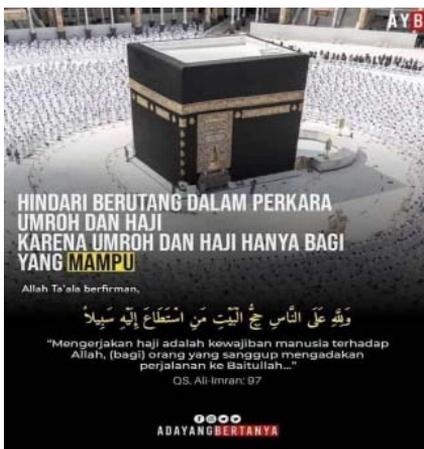
Prinsip dari Asuransi Syariah Istikmal ini sama seperti CAR 3i yaitu kita diajak bergabung dengan kelompok raksasa

bisnis Central Asia Raya Group untuk mempunyai Tabungan, mempunyai perlindungan Asuransi, juga mempunyai peluang untuk mendapatkan Penghasilan Tambahan.

Manfaat Polis:

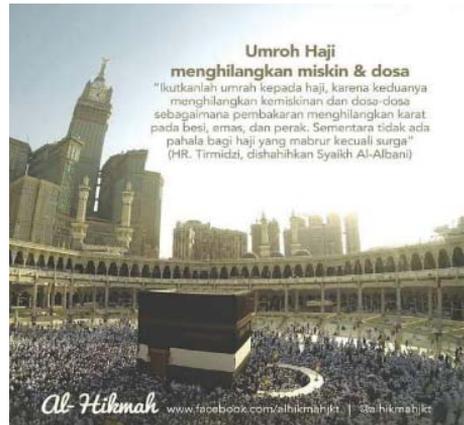
- Jika Peserta tetap hidup pada akhir Masa Kepesertaan, maka akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

- Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam 2 (dua) tahun pertama Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta (tidak termasuk ekstra kontribusi) dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah Masa Kepesertaan melebihi 2 (dua) tahun, maka Santunan Asuransi dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan



kepada Yang Ditunjuk.

- Jika Peserta menghentikan kepesertaan sebelum Masa



Kepesertaan berakhir maka akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Ketentuan Produk:

1. Mata uang: Rupiah
2. Usia Masuk: 1 tahun s/d 59 tahun
3. Usia Pemegang Polis: 18 tahun s/d 75 tahun
4. Masa Kepesertaan: 7 (tujuh) tahun
5. Masa Pembayaran Tabungan/Kontribusi: 5 (lima) tahun
6. Pilihan Tabungan per bulan: Rp 350 rb, Rp 700 rb, Rp 1 juta, dan Rp 2 juta
7. Pilihan Frekwensi Pembayaran Tabungan: Bulanan, Kwartalan, Semesteran & Tahunan
8. Santunan Asuransi: 5x Tabungan Peserta Tahunan (Minimal Rp 21.000.000,-)

Demikian semoga bermanfa'at.

Jakarta, Oktober 2022

Wass, DR

(**) IKPLN Cabang Kantor Pusat

ILMU PENGETAHUAN – Pembentukan Holding & Subholding Company dan Tantangan Transformasi Digital

Analisis dari Perspektif Manajemen
Strategis:

Oleh: Dr.Ir.Manerep Pasaribu, MM



“Kunci sukses pembentukan holding dan sub-holding company adalah perubahan proses bisnis dengan dukungan transformasi digital yang dapat menciptakan peningkatan produktivitas dan efisiensi dan dirasakan nilai (value) di pelanggan dan pemegang saham”

Tujuan adalah memperkuat dan mempertegas fungsi korporasi & bisnis

Pembentukan holding dan subholding adalah untuk mempertegas dan memperkuat fungsi korporasi dan fungsi bisnis dalam mencipta pola korporasi baru, agar lebih menjamin kinerja keuangan menjadi positif. Hal itu dapat dicapai melalui perbaikan **“proses bisnis perusahaan”** yang akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi yang prima sebagai layanan yang lebih baik. Selain itu, agar pemanfaatan asset lebih optimal, maka perusahaan juga lebih siap menghadapi tantangan zaman yang mengandung pelbagai ketidakpastian, seperti adanya konflik geopolitik berkepanjangan yang mendisrupsi *supply chain* barang/jasa kebutuhan dunia misalnya ketidak pastian pasokan makanan, energi dan air serta disrupsi pasar dari perubahan teknologi seperti pemanfaatan transformasi digital diberbagai aktivitas bisnis dan organisasi.

Selanjutnya pekerjaan subholding, yang terbentuk sebagai spesialisasi, akan lebih terfokus untuk meningkatkan efektifitas kinerjanya. Dalam ilmu manajemen strategis, pola sub-holding merupakan strategi bisnis, masing masing unit usaha mempunyai keahlian yang unik dan mantap. Manajemen yang bersifat komprehensif ditangan

pengurus tertentu, tidak tepat dipertahankan lagi cara-cara lama/tradisional, karena tuntutan masyarakat makin kritis, misalnya perusahaan akan lebih berhasil mencapai sasaran *cost per unit dari produksi barang dan jasa*, yang akan lebih kompetitif di pasar, disamping akan sangat dihargai oleh masyarakat konsumen.

Adam Smith menyarankan pola spesialisasi untuk mencapai kinerja yang tinggi

Adam Smith dalam bukunya, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* (1776), mengajarkan bahwa dalam sistem *Division of Labor* atau spesialisasi, melaksanakan pola organisasi perusahaan agar tercipta tugas-tugas dijalankan dengan terfokus, berlandaskan ekspertis (bukan keahlian administratif), dan sekaligus juga tugas-tugas tersebut saling melengkapi (*complementary tasks*), sehingga korporasi dapat berprestasi dan sukses secara optimal. Disamping itu juga, spesialisasi akan meningkatkan kompetensi inti /*core competency* (Barney, 2010) yg akan menjelma menjadi peningkatan kinerja organisasi, dan memperbaiki pendapatan pekerja, disamping berdampak positif pada ekonomi. Penerapan teori Adam Smith (1776) dalam bentuk *Division of Labor* tersebut, sesuai dengan teori pembentukan holding- subholding

yang melakukan pelbagai pekerjaan pada berbagai bisnis dengan dimensi-dimensinya saling terkait mengelola lebih produktif dan efisien dari berbagai aktivitas

Transformasi digital memberi kelengkapan pada pelaksanaan *Division of Labor*, terutama dalam hal melancarkan saling memperhitungkan antar spesialisasi, dan memfasilitasi kolaborasi antara spesialisasi pada subholding, agar masing masing kegiatan sub-holding dapat membangun kinerja yang tinggi.

Manajemen umum memfasilitasi strategi korporasi, spesialisasi memperkuat strategi bisnis untuk pencapaian kinerja

Umumnya organisasi korporat besar membentuk Holding dan Subholding, yang mengakomodasi aneka ragam teknologi diberbagai aktivitas bisnis dengan tuntutan aneka ragam keahlian, dan mengandung asset besar. maka tidak mungkin pengelolaan dilakukan secara tradisional oleh tim eksekutif puncak sendiri, seperti strategi korporasi perusahaan swasta yang eksekutif puncaknya memimpin dan mengendalikan seluruh operasi perusahaan agar seluruh asset kekayaan pribadi dapat tetap terjaga.

Oleh sebab itu, organisasi besar yang bertanggung jawab melayani pelanggan banyak, maka kebijakan dan

implementasinya yang berimplikasi tanggung jawab, disebar menurut keahlian dalam teknologi dan manajemennya yang bisa berbeda, diakomodasi dalam bentuk sub-holding yang dapat lebih fokus pada strategi bisnis, sementara holding akan lebih fokus pada korporat strategis, yang memikirkan pertumbuhan bisnis yang makin efisien dan pengembangan usaha (Hitt dkk, 2020).

Tantangan didepan adalah transformasi digital

Tantangan yang dihadapi korporasi saat ini adalah cepatnya perubahan yang tiada berakhir yang mengandung ketidakpastian yang tinggi. Fenomena lingkungan eksternal ini pada bisnis, makin memerlukan bantuan transformasi digital, yang saat ini sedang perhatian makin banyak pihak secara eksponensial (Marr, 2021). Dunia bisnis masa kini yang peduli pada efisiensi dan keamanan bisnis, berbenah menghadapi perubahan dengan tingkat ketidakpastian berbeda-beda serta kompleksitas, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Solusinya adalah mengadaptasi prinsip kerja transformasi digital, yaitu memberi data real time/on-line tentang perubahan lingkungan eksternal seperti perubahan harga material utama kapan saja dan kondisi real time operasionalisasi pekerja primer dan unit/ alat yang digunakan.

Dikaitkan dengan transformasi digital

yang sudah ada di depan kita yang bertujuan meningkatkan produktivitas para pekerja dan efisiensi adalah sejalan dengan teori Adam Smith di atas. Adam Smith mempertegas lagi bahwa bila seseorang atau bisnis lebih fokus, akan lebih berhasil dalam mengerjakan spesialisasinya, tanpa membangun organisasi yang besar. Prinsip ini juga yang berlaku dalam prinsip digital, mengerjakan satu pekerjaan yang sejenis/khusus dengan metode atau aplikasi yang khusus, namun diperkaya dengan data yang relevan dan terkini (real time).

Inti transformasi digital adalah proses bisnis atau sistem

Transformasi digital mendominasi wacana praktis dan ilmiah. Namun, banyak perusahaan tidak memiliki rencana yang jelas tentang bagaimana mendekatinya. Menurut (Fischera, dkk, 2020), Langkah awal yang dipersiapkan dengan baik adalah proses bisnis atau sistem sebelum menerapkan transformasi digital. Transformasi digital umumnya mengarah pada perubahan prosedur atau sistem (SOP, Model bisnis, Metode Kerja, Cara Kerja, Norma, Petunjuk Kerja) dan Perubahan struktur organisasi sesuai strategi yg diputuskan (Alfred Chandler,1961). Proses Bisnis dianggap sebagai "seni dan ilmu mengawasi bagaimana pekerjaan dilakukan dalam suatu organisasi, untuk memastikan hasil yang konsisten dan untuk mengambil

keuntungan dari peluang perbaikan, lebih produktif dan lebih efisien.

Transformasi digital bukan masalah teknologi, tetapi adalah perubahan “mindset” semua orang dalam organisasi yang harus sama dan berfokus pada transformasi (Westerman, 2019). Jawaban dari transformasi digital, bukan teknologi atau digital, melainkan transformasi

(transformation) perbaikan proses bisnis dari para pekerja/alat dari satu keadaan yang baik menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Lebih jauh Schwab (2019) dalam bukunya Revolusi Industri 4.0, kunci sukses dalam revolusi industri 4.0 bukan teknologi tetapi perbaikan sistem. Artinya peningkatan produktivitas dan efisiensi harus terjadi setiap waktu. Selanjutnya langkah apa yang perlu dibenahi?

Pertama, benahi proses bisnis atau sistem dengan benar termasuk model bisnis, SOP, metode kerja, cara kerja, sehingga akan membawa perubahan drastis dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi. Kedua, strategi digital perlu dibuat sebagai peta jalan/ road map untuk implementasi transformasi ini. Rencanakan strategi digital yang menjadi kemudi organisasi dari setiap tahapan yang akan dilakukan. Ketiga, apabila proses bisnis atau sistem sudah benar yang mencerminkan transformasi atau perubahan yang sangat mendasar berdasarkan prinsip

digitalisasi dan strategi digital sebagai peta jalan, maka proses digitalisasi dengan transformasi digital akan mudah dicapai.

Kepemimpinan transaksional menjadi transformasional

Berdasarkan berbagai penelitian para pakar, kepemimpinan yang tepat dalam transformasi digital adalah yang berproses secara bottom-up. Peningkatan kinerja pekerja primer/aktivitas primer adalah keberhasilan transformasi digital. Hal ini bisa dicapai melalui kepemimpinan transformasional (bottom-up), seperti pembentukan holding, yang mempercayai sub-holding melaksanakan tugas yang diberi spesialisasi, dalam rangka memberi layanan kepada publik.

Oleh sebab itu kunci kesuksesan reorganisasi ini adalah peran pekerja primer/aktivitas primer yang bekerja di grass-root atau mereka yang melayani pelanggan langsung. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan kepemimpinan transformasional, dimana pemimpin subholding memberdayakan dan mempercayai “grass-root” pada sub-holdingnya berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelanggan.

Sedangkan kepemimpinan transaksional memfokus pada pemasukan uang pembayaran pelanggan, dengan memonitor dan

mengendalikan semua kegiatan (top-down) sehingga biaya- biaya investasi yang dikeluarkan menjadi terkendali dan memperoleh keuntungan.

Melalui transformasi digital maka kinerja pekerja primer/aktivitas primer akan meningkat, dan memberdayakan para pekerja primer dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari asset

atau teknologi yang menjadi tanggungjawabnya.

Kesimpulan dan manfaat yang didapat

Dengan pembentukan holding company dan subholding maka proses bisnis yg dimiliki akan lebih mudah diimplementasikan dengan dukungan transformasi digital. Kunci sukses pembentukan holding dan subholding company adalah perubahan

proses bisnis (seperti model bisnis, sistem, SOP, metode kerja, dan best practices) ditambah dengan dukungan transformasi digital akan dapat menciptakan peningkatan produktivitas dan efisiensi dan dirasakan nilai (value) di pelanggan perusahaan dan pemegang saham. ***

Dr. Ir. Manerep Pasaribu, MM; Staf Pengajar Paskasarjana PPIM FEB UI dan Anggota Indonesian Strategic Management Society (ISMS). HP 0811383861, Email: mail.emperism@gmail.com.

Website: www.emperism.com

Artikel ini merupakan materi pertemuan daring yang diselenggarakan IKPLN DJPP pada tanggal 12 Oktober 2022

Pajak Karbon di INDONESIA

Oleh : Dr. Ir. Dewi Oehadijono (***)

Perubahan iklim telah menjadi penyebab utama bencana yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Kebakaran hutan, lahan (karhutla) dan energy & transportasi merupakan salah satu

bencana yang terjadi akibat perubahan iklim tersebut. Bencana ini sering terjadi secara bersamaan di kawasan Eropa pada saat musim panas, disebabkan karena suhu yang ekstrim dapat memperparah bencana karhutla.

Kementrian Keuangan (2021), Indonesia merupakan negara kepulauan dan rentan akan risiko perubahan iklim (Gambar 1), seperti kenaikan permukaan laut. Dari tahun 1981-2018, Indonesia mengalami tren kenaikan suhu sekitar 0.03 °C per tahun (*BMKG, 2020*). Dari tahun 2010-2018, emisi GRK (Gas Rumah Kaca) nasional mengalami tren kenaikan sekitar 4,3% per tahun (*KLHK, 2020*) dan mengalami kenaikan permukaan laut 0,8-1,2 cm/tahun, sementara sekitar 65% penduduk tinggal di wilayah pesisir (*Bappenas, 2021*), perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, yang saat ini mencapai 80 % dari total bencana yang terjadi di Indonesia (*NDC, 2016*).

Pemerintah secara tahapan pada road map pajak karbon akan diimplementasikan dan pajak karbon dapat menjadi instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip 'pencemar membayar'.

Perdagangan Karbon di Indonesia

Pemerintah baru saja menerbitkan aturan tentang pasar karbon sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap Nationally Determined Contributions (NDC) terkait isu perubahan iklim, baik dalam bentuk penguatan program maupun strategi.

Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021, ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021, sebelum berangkat ke Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP26) di Glasgow awal November 2021. Skema pasar karbon tersebut dapat menjadi insentif untuk pencapaian target NDC, dimana NDC sendiri berisi komitmen Indonesia terhadap agenda pengurangan emisi karbon, baik dengan upaya sendiri yang bisa mencapai 29 persen atau 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Menjadi pertanyaan menarik adalah apa manfaat dari sisi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) bagi Indonesia? Bila ditelisik lebih jauh, Perpres NEK itu di dalamnya mengatur soal pasar karbon. Bagi Indonesia, dengan adanya regulasi itu memungkinkan untuk menerima pendanaan yang lebih luas dalam pengendalian perubahan iklim.

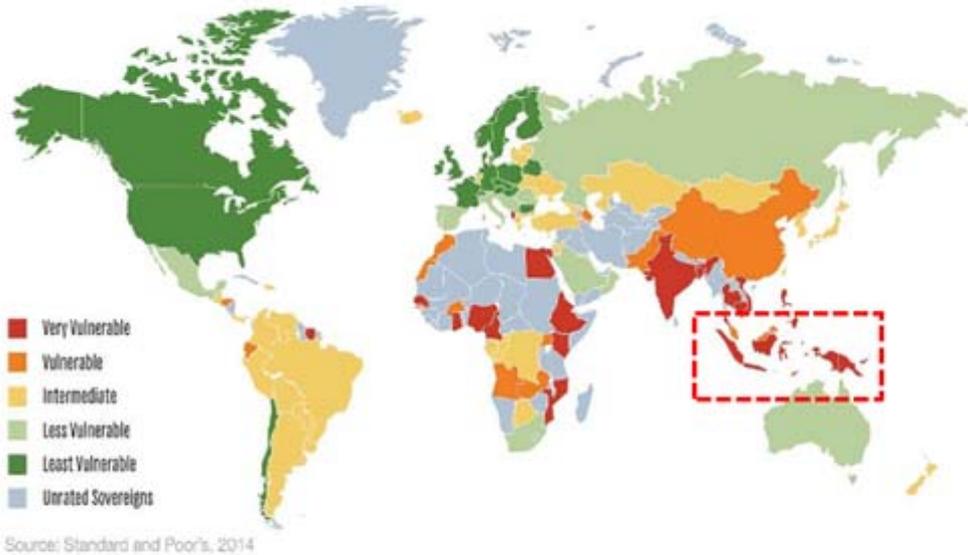
"Pemerintah sangat memahami bahwa untuk mencapai target NDC diperlukan inovasi-inovasi instrumen kebijakan. Penetapan Perpres NEK ini merupakan tonggak penting dalam menetapkan arah kebijakan Indonesia menuju target NDC 2030 dan NZE 2060,"

Dorong Investasi Hijau

Laksmi dalam keterangan KLHK (2021), Perpres nomor 98 tahun 2021 diharapkan bisa menggerakkan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang

berdampak pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam Perpres NEK itu, ada beberapa mekanisme perdagangan karbon yang diatur, yaitu perdagangan antara dua pelaku usaha melalui

Perpres No 98 Tahun 2021 ditujukan untuk pasar domestik maupun internasional. Apabila perdagangan karbon terjadi antara dua entitas di dalam negeri maka perhitungan pengurangan



Gambar 1. Peta Resiko Perubahan Iklim

skema *cap and trade*, pengimbangan emisi melalui skema *carbon off set*, pembayaran berbasis kinerja (*result based payment*), dan pungutan atas karbon, serta kombinasi dari skema yang ada. Skema *carbon pricing* dapat menjadi insentif untuk pencapaian target NDC untuk pengendalian perubahan iklim. Dan *Carbon pricing* diharapkan mendukung instrumen lain yang juga dilakukan seperti pengendalian kebakaran hutan, pencegahan deforestasi dan degradasi, atau transisi teknologi untuk mewujudkan energi baru terbarukan.

emisi GRK yang dicapai akan tetap diperhitungkan sebagai kontribusi Indonesia.

Harapannya, dunia internasional pun mau mewujudkan penetapan harga karbon yang adil bagi negara-negara pemilik cadangan karbon. Indonesia sendiri berencana menerapkannya pada 1 April 2022 PLTU batu bara dengan skema *cap and tax* yang searah dengan implementasi pasar karbon yang sudah berjalan (UU 7/2021 pasal 13). Persoalan, penetapan harga pajak karbon Indonesia sebesar

Rp30 per kilogram (kg) karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara dinilai terlalu murah. Terlepas dari semua itu, bisa jadi ini semua masih sebuah awal yang kemudian nantinya bisa disesuaikan sesuai dengan pasarnya.

PAJAK KARBON DI INDONESIA

Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan. Risiko Dari Perubahan Iklim yaitu kelangkaan air, kerusakan ekosistem lahan, kerusakan ekosistem lautan, penurunan kualitas kesehatan dan kelangkaan pangan. Perubahan iklim terjadi akibat emisi gas rumah kaca yang meningkat. Konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat disebabkan sebagian besar oleh faktor antropogenik, yakni karena ulah manusia. Hampir seluruh kegiatan manusia berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas rumah kaca, seperti penggunaan sumber energi dari bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi berkontribusi terhadap hampir 2/3 emisi gas rumah kaca secara global.

Pengenaan pajak karbon memiliki beberapa keuntungan yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dari sumber emisi serta Pendapatan pajak karbon dapat digunakan untuk mendanai pengembangan perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi, dan investasi ramah lingkungan, serta mendukung

masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk hibah, membantu masyarakat.

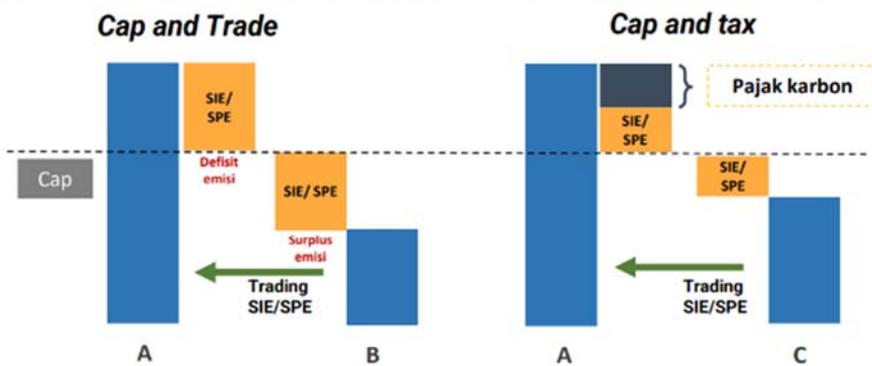
Sektor pembangkit listrik di Indonesia

Ketenagalistrikan Pada 2021, konsumsi listrik per kapita mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1.123 kWh/kapita. Hal ini tidak terlepas dari tumbuhnya kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 74 Giga Watt (GW) di 2021 guna menjaga kebutuhan listrik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, realisasi rasio elektrifikasi tahun 2021 sebesar 99,45% dan rasio desa berlistrik mencapai 99,62%. Sementara pada tahun 2022, pemerintah menargetkan 100% baik rasio elektrifikasi maupun rasio desa berlistrik. "Upaya tersebut bisa melalui perluasan jaringan, pembangunan minigrig, penyediaan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan pelaksanaan program Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Miskin," Pada program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pemerintah terus mempercepat status pembangunan infrastruktur dengan rincian 267 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKLU) di 224 lokasi dan 266 unit Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) di 265 lokasi sudah terbangun hingga 2021. Sementara itu, 71 unit sepeda motor telah dikonversi dari BBM ke listrik serta

29 unit sedang dalam proses penyelesaian.

Pajak karbon akan diimplementasikan bertahap sesuai road map. Tahapan dimulai tahun 2021 dengan diundangkannya UU HPP yang salah satu klausulnya adalah pajak karbon dan finalisasi Rancangan Perpres tentang Nilai

pada piloting perdagangan karbon pembangkit listrik. Pajak karbon akan diimplementasikan secara terbatas (mundur dari rencana 1 April 2022 menjadi 1 Juli 2022). Sektor yang dikenakan pertama kali adalah PLTU batubara dengan tarif C/tCO₂e. Entitas yang mengeluarkan emisi lebih tinggi dari cap-lah yang akan dikenakan pajak



Entitas yang mengemisi lebih dari cap diharuskan membeli ijin emisi (SIE) dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau membeli sertifikat penurunan emisi (SPE/offset karbon)

Ekonomi Karbon. Tahun 2021 juga dilakukan pengembangan mekanisme teknis pajak karbon dan bursa karbon dan uji coba perdagangan karbon di sektor pembangkit oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Besaran pajak dikenakan dengan harga rata-rata Rp30.000/tCO₂e. Sebanyak 32 PLTU berpartisipasi dalam uji coba penerapan pajak karbon ini (cnbcindonesia.com, 22 Oktober 2021). 21 Tahun 2022 ditetapkan cap (batas atas emisi) untuk sektor pembangkit listrik batubara oleh Kementerian Energi ESMD, yang berlaku

karbon. Ada 2 mekanisme pajak karbon yakni cap and trade dan cap and tax.

Implementasi pajak karbon akan diselaraskan dengan mekanisme perdagangan karbon.

Sumber : Kementerian Keuangan, 2021

Pada cap and trade, entitas yang mengemisi lebih dari cap membeli Sertifikat Izin Emisi (SIE) dari entitas yang mengemisi di bawah cap, atau membeli Sertifikat Penurunan Emisi (SPE/carbon

offset). Sedangkan pada cap and tax, dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli SIE atau SPE tetapi emisi di atas cap seluruhnya, maka sisa emisi inilah yang akan dikenakan pajak karbon. Tahapan selanjutnya tahun 2025 antara lain dengan implementasi perdagangan karbon secara penuh melalui bursa karbon dan perluasan sektor pemajakan pajak karbon sesuai kesiapan sektor. Sedangkan objek pajak karbon adalah pembelian barang berkarbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu. Adapun tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif paling rendah Rp30,00/CO₂e. Dasar pajak karbon bukan atas setiap emisi yang dirilis dari seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan, melainkan kelebihan emisi dari batas ambang emisi yang ditetapkan.

PAJAK KARBON UNTUK PLTU

Keberadaan regulasi yang menetapkan Batas Atas Emisi (BAE) sektor yang ditetapkan dikenakan pajak karbon menjadi sangat urgent. Apabila sektor PLTU batubara akan dikenakan pajak karbon, maka BAE untuk sektor ini harus ditetapkan terlebih dulu oleh Kementerian ESDM. Dalam catatan Kementerian ESDM, ada 3 grup klasifikasi penetapan pajak karbon PLTU batu bara.

Pertama, PLTU dengan kapasitas di atas 400 MW. Nilai batasan emisi ditetapkan sebesar 0,918 ton CO₂ per MegaWatt-hour (MWh). Kedua, PLTU dengan kapasitas 100-400 MW, dengan nilai batasan emisi 1,013 ton CO₂ per MWh. Ketiga, PLTU Mulut Tambang 100-400 MW, dengan nilai cap sebesar 1,94 ton CO₂ per MWh. Sementara PLTU dengan kapasitas < 100 MW belum diterapkan cap, trade dan tax.

Kesimpulan.

Road map pajak karbon yang memuat strategi penurunan emisi karbon dalam NDC, sasaran sektor prioritasnya, keselarasan dengan pembangunan EBT, serta keselarasan dengan kebijakan lainnya. Implementasi pajak karbon dilakukan secara bertahap, mulai dari tahun 2021 dengan diundangkannya UU HPP dan uji coba penerapan pajak karbon di beberapa sektor, dengan akan diimplementasi pada sektor PLTU batubara, hingga 2025 implementasi bursa karbon dan perluasan sektor pemajakan.

Pengaturan pajak karbon didasarkan pada Pasal 13 UU HPP di mana subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang berkarbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon, sedangkan objeknya adalah pembelian barang

berkarbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Dasar perhitungannya adalah kelebihan emisi dari ambang batas yang ditetapkan. Pajak karbon adalah salah satu instrumen NEK. Diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam peraturan regulasi turunan NEK dan NDC, PP tentang road map dan alokasi pajak karbon dan PMK tentang mekanisme pengenaan pajak dan tarif dasarnya. Pajak karbon dibutuhkan untuk mendorong penggunaan EBT.

Pemerintah akan perlu terus mengawasi dan mendorong kebijakan ini dalam upaya perubahan dari energi fosil ke EBT.

Di samping itu, pajak karbon terkait erat dengan penerimaan negara. Perlu Tim Legislatif melakukan pengawasan kepada pemerintah agar tahapan pada road map pajak karbon dapat diimplementasikan dan pajak karbon dapat menjadi instrumen pengendalian iklim dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sesuai prinsip ‘pencemar membayar’

Peran IKPLN

Banyak yang dapat dilakukan oleh IKPLN dalam membantu pelaksanaan program Pemerintah ini, antara lain pada sector pendidikan, jasa dan lainnya.

(***) IKPLN Cabang Kantor Pusat

AGAMA –Tauladan Kejujuran Nabi MUHAMMAD SAW dalam Berniaga

Buhaira adalah nama di pendeta Nasrani yang mengetahui tanda-tanda kenabian Muhammad SAW ketika beliau baru berusia 12 tahun..

Ketika itu beliau ikut berdagang ke Syam mengikuti pamannya Abu Thalib*)

Di dalam buku pelajaran Sirah Nabawiyah..

Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awwal tahun gajah..atau Masehi 570 M tepatnya hari Senin di Mekah Al Mukaramah..Ayahnya bernama Abdullah

dan ibunya Siti Aminah..Muhammad lahir dalam keadaan yatim..di rumah pamannya Abu Thalib..

Sejak sedari kecil Muhammad diajari untuk menggembala kambing hingga usia 12 tahun..sebelumnya Muhammad di bersihkan hatinya sewaktu menggembala kambing oleh kedua Malaikat..

Setelah usia 12 tahun Muhammad diajak pamannya berdagang ke Syam (Suriah)..

Diperjalanan khalifah ini bertemu seorang pendeta yang bernama

Buhairah..dan berkata kepada pamannya agar menjaga anak ini..karena anak ini kelak akan menjadi pemimpin atau nabi..

Dengan gembira sekali Abu Thalib mendengar pesannya pendeta Nasrani itu..

Berdagang ini berlanjut hingga dewasa..usia 25 tahun Muhammad dinikahkan dengan Siti Khadijah yang sudah berusia 40 tahun..

Dengan demikian..dagangan Muhammad bertambah maju dikarenakan beberapa hal..diantaranya modal bertambah besar..Muhammad dalam berdagang sangat jujur adanya..apabila ditawar..barang ini harga berapa..muhammad menjawabnya dengan besaran angka sewaktu beli..apabila ditawar masih di bawah harga belinya tidak boleh..

Muhammad berkata..(semisal beli 50 dirham) silakan diberi untung.. Nggak pernah mengurang timbangan..apabila menemukan kesulitan dalam menimbang Muhammad justru melebihkan..

Dengan kejujurannya ini Muhammad mendapat julukan al amin..

Secara umum jujur merupakan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang..

Artinya seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya disertai tindakan yang seharusnya*)

Bukan seperti pedagang pada umumnya di Indonesia banyak kebohongannya..terutama di pasar-pasar itu banyak terjadi kebohongannya..

Ada ibu-ibu di pasar baru saja buka dasar..nggak lama kemudian ibu-ibu yang lain datang dan bertanya..durianmu harganya berapa..dijawabnya 25 ribu..ditawar 20 ribu..durian kecil-kecil boleh nggak..dijawab baru saja ditawar 30 ribu..pedagang sebelahnya tertawa kecil sambil berkata di dalam hatinya (bohong!!!..buka dasar saja barusan)..belum lagi mengurangi berat timbangannya..beli di pasar 1 kg..sesampai di rumahnya ditimbang ulang hanya 9 ons.. pada hal Nabi Muhammad memberikan contohnya seperti itu..

Muhammad sering berkilwat di bukit Tsur tepatnya di gua Hira..suatu saat didatangi Malaikat Jibril untuk menyampaikan dakwahnya..semenjak itu Muhammad diangkat menjadi Nabi Muhammad SAW..

Mulai saat itu Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah..hingga wafat pada usia 63 tahun di Medinah Al Munawwarrah..

Sebaiknya seseorang itu mengikuti cara kehidupan Nabi Muhammad SAW tentang kejujuran..

Hadits Nabi yang artinya..

Bekerjalah untuk duniamu seolah kamu akan hidup selamanya..dan

Bekerjalah untuk akhiratmu seolah kamu akan mati besok pagi..

Kesimpulan

Sebaiknya sisa kehidupan seseorang ini mencontoh Nabi Muhammad SAW..

Hadits Nabi yang artinya..

Bekerjalah untuk duniamu seolah kamu

akan hidup selamanya..dan

Bekerjalah untuk akhiratmu seolah kamu akan mati besok pagi..

*)Sumber google

penulis hasur (haji suripto)

Pensiunan IKPLN UIP2B UITJBB

RAGAM - Cubit – Cubitan

Oleh : M.Budi Setianto (*)

Saya ingat persis, saat itu tahun 2003. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi anggota Tim Delegasi PLN

perusahaan listrik ASEAN, dimana PLN menjadi salah satu anggotanya. Saat itu yang saya ikuti adalah Working Group tentang Renewable Energy, atau di kita dikenal sebagai energi terbarukan/EBT.



dalam Working Group Meeting – HAPUA (Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities), kerjasama antar

Development Working Group, diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di lokasi yang belakangan ini sempat ngetop

Walau sudah pernah ikut serta dalam forum kerjasama ASEAN itu, jauh sebelumnya di tahun 1991, namun sempat dag-dig-dug juga, karena harus presentasi. Waktu tahun 1991 itu, yaitu masih dengan nama: Micro/Mini-Hydro

sejagat : Duren Tiga !. Ya Duren Tiga di PLN Puslitbang. Karena tuan rumah, jadi anggota Tim Delegasi Indonesia cukup banyak, jadi saya hanya sebagai anggota “unthul bawang” saja. Anggota muda yang cukup ikut, duduk manis saja, kira-kira begitu. Saat itu saya ingat, pak Moh. Sofyan, yang pernah menjadi Kadiv EBT, juga ikut.

Kembali ke tahun 2003, HAPUA Meeting itu diselenggarakan di Malaysia, persisnya di Langkawi. Langkawi ini sebuah pulau di pantai barat Malaysia, berlokasi di dekat perbatasan Malaysia-Thailand. Konon Langkawi ini digenjut untuk dijadikan sebagai pulau wisata, seperti halnya pulau Dewata kita.

Inti dari cerita ini bukan tentang apa isi dari HAPUA Meeting, seperti apa saja yang dipresentasikan dan lainnya, tetapi justru pada acara “hiburannya”. Yaitu pada acara malam perpisahan (farewell party). Berupa forum makan malam, dilengkapi dengan acara karaoke bersama. Biasanya setiap delegasi harus ada yang tampil. Wah... saya pun sempat dag-dig-dug lagi. Mau nyanyi apa kira-kira. Membolak-balik buku tebal list/daftar lagu, biasanya kita pura-pura asyik sibuk membolak-balik dengan

alasan mencari lagu lama, tahunya supaya lama mencarinya, hingga kesempatan nyanyi habis. Saya lihat ada berlembar judul-judul lagu di kelompok lagu Malaysia, yang ternyata cukup banyak berisi judul lagu dari grup-grup band Indonesia jadul, seperti Koes Plus dan band segenerasinya. Soal masuk ke dalam judul lagu-lagu Malaysia, toh sudah biasa



kan tetangga kita itu, berlaku seperti itu. Akhirnya ketemu satu lagu, ya dari Koes Plus itu: Kembali ke Jakarta!. Maka berkumandanglah lagu “Kembali ke Jakarta”, soal suara fals atau sumbang, ya biarkan saja. Sepertinya tema lagunya cocok dengan forum itu, kan besoknya akan pulang ke Jakarta.

Selesai sudah “tugas negara” membawakan lagu Koes Plus itu. Tiba-tiba salah satu anggota tim delegasi Malaysia yang duduk semeja dengan saya,

memperlihatkan lembar halaman list lagu, sambil setengah bertanya : Cubit-Cubitan boleh ?. Sekejap, terpikir lho kok sepertinya minta ijin ke saya ya. Beberapa detik kemudian baru ingat, kata “boleh” dalam bahasa Malaysia adalah berarti “bisa” (baca: mampu). Berarti saya ditanya dan diajak nyanyi Cubit-Cubitannya Koes Plus oleh si Malaysia itu. Dalam hati hayo saja, siapa takut !. Rupanya dia penggemar Koes Plus juga. Maka mengalunlah lagu Cubit Cubitan lewat duet Indonesia-Malaysia. Lagu itu pada masanya makin ngetop lewat suara manja dari Elvy Sukaesih, yang sempat menjadi pasangan duet raja dangdut Rhoma Irama.

Tahun 2010 terakhir masih berkesempatan ikut “Tim Delegasi” Indonesia dalam HAPUA Meeting di Cebu-Philipina. Mengapa kata Tim Delegasi di atas diberi tanda petik, karena anggota Tim Delegasi di Renewable Working Group itu hanya saya sendiri. Memang ada teman PLN juga yang ikut ke Cebu, tetapi di Working Grup bidang lain. Disitu

acara puncak hiburannya adalah ajojing diringi dengan musik joget atau sering disebut disko, semua delegasi dipaksa turun ke lantai ajojing disko tersebut, yah... anggap saja senam.

Di Cebu itu sebenarnya sudah ada “janjian”, bahwa di forum tahun berikutnya di 2011 (rencana di Thailand), masing-masing delegasi sudah diberi tugas mempresentasikan topik tertentu. Namun sayang sekali, pada saat undangan dari Thailand muncul, saat itu sekitar Mei 2011, ternyata PLN sedang menerapkan “lock down” alias puasa satu bulan tanpa SPPD. Lho? Ya begitulah saat itu demi penghematan, Dirut Dahlan Iskan menerapkan kebijakan sapu jagat seperti itu. Upaya memenuhi janji presentasi terpaksa terkubur, bahkan sampai saya usul dengan biaya sendiri (wah gaya sekali ya, walau sambil dag-dig-dug juga), namun tetap tidak diperbolehkan. Sekian !.

(*) pesiunan PLN





Jl. Raya Pasar Minggu No.5 Pancoran
 Jakarta – 12780 – Indonesia
 Phone : 021 – 7995888 (Hunting)
 Fax.: 021- 7920988, 79184342, 79183422
 Customer Service :
 cs@plninsurance.co.id
 www.plninsurance.co.id



Solusi Untuk Proteksi



Solusi Untuk Protek



Asuransi Kesehatan



Asuransi Kebakaran



Asuransi Kendaraan Bermotor



Asuransi Kredit



JETTY MANAGEMENT

Pengoperasian dermaga, pengadaan TKBM, penyediaan alat berat berikut operator, proses pembongkaran batubara, serta penjagaan keamanan dan keselamatan fasilitas pelabuhan dengan pembersihan dermaga dan tongkang sesuai standar yang ditetapkan.



TUG ASSIST

Kegiatan kenavigasian untuk penundaan kapal atau tongkang di pelabuhan, laut lepas atau kolam pelabuhan khususnya dalam kegiatan penyandaran dan lepas landas kapal.



CARGO TRANSSHIPMENT

Alih muatan di laut lepas (open sea) untuk memenuhi pasokan khususnya batubara dari kapal besar (mother vessel) ke tongkang berbagai ukuran selanjutnya diteruskan ke masing-masing jetty PLTU



LOGISTICS

Bongkar muat serta pengangkutan barang-barang proyek pembangunan pembangkit dan transmisi dari pelabuhan Indonesia hingga tiba di lokasi tujuan



SHIPPING AGENCY

Melayani kebutuhan kapal atau tongkang dan pengurusan in/out clearance kapal atau tongkang yang akan masuk pelabuhan



MAINTENANCE BUOY

Pemeliharaan Buoy Navigasi untuk keselamatan pelayaran



TEMPORARY JETTY

Pembuatan Jetty serta pemeliharaannya untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan bongkar muat khususnya batu bara



DREDGING

Jasa pengerukan alur dan kolam pelabuhan yang mengalami pendangkalan

HUBUNGI KAMI :

Jl. Kartini VII No. 2 RT 010 RW 04
Kelurahan Kartini
Kecamatan Sawah Besar
Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10750
Phone : 021-22685989 / 22686001
Fax : 021-22685669
Email :
kantorpusat@adhigunaputera.com
Website :
www.adhigunaputera.com

KONTAK PERSON :

**KEPALA DIVISI USAHA
AHMAD YULMAN
0812-8815-8837**

**MANAGER DIVISI USAHA
RASTONO
0812-1399-2939**